

ABSTRAK

DICKI ANDI HERIYADI, NPM. 2022455: Judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN DESA BARAMBAN KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN”. Dibimbing oleh Bapak **Arif Budiman, S.Sos., M.AP** sebagai Pembimbing I dan Bapak **Riswandi Ahdiat, S.Sos., M.A** Sebagai Pembimbing II

Penulisan ini dilatar belakangi Program Santunan Kematian berangkat dari kebutuhan yang muncul ketika terjadi kematian seseorang yang semuanya membutuhkan biaya, permasalahan kurangnya respon pelaksana, Tidak tepatnya sasaran yang dilakukan untuk peruntukan dana santunan dan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat kategori miskin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diambil melalui penarikan secara *purposive sampling* berjumlah 12 orang, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data antara lain perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan mengadakan *membercheck*.

Hasil penelitian kurang baik, hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, sub variabel Komunikasi dari indikator kejelasan kurang baik yang mana banyak warga yang belum memahami. Indikator konsisten sudah baik yang mana pelayanan santunan kematian sudah diberikan secara setara. Indikator target kurang baik yang mana belum tepat sasaran. *Kedua*, sub variabel sumberdaya dari indikator kompetensi implementor kurang baik yang mana petugas/pelaksana belum sepenuhnya memahami prosedur. Indikator sumberdaya finansial sudah baik yang mana santunan yang diberikan sangat berada di jalur utama. Indikator sumberdaya manusia kurang baik yang mana jumlah petugas belum cukup. *Ketiga*, sub variabel disposisi dari indikator komitmen sudah baik yang mana petugas selalu menunjukkan kesungguhan dalam membantu masyarakat. Indikator sikap sudah baik yang mana petugas selalu bersikap ramah. Indikator proses kurang baik yang mana sering terjadi keterlambatan. Indikator efisien kurang baik yang mana waktu yang dibutuhkan terjadi keterlambatan dalam proses pencairan. *Keempat*, sub variabel struktur birokrasi dari indikator SOP sudah baik yang mana dilaksanakan dengan prosedur yang sangat jelas. Indikator koordinasi kurang baik yang mana informasi dari RT/RW dan aparat desa belum tersampaikan. Indikator pengawasan kurang baik yang mana tidak terlihat adanya mekanisme kontrol yang berjalan secara konsisten. Faktor penghambat adalah sosialisasi program yang belum dilakukan secara maksimal, kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) pelaksana. Sedangkan faktor pendukung adalah santunan kematian diberikan secara sama kepada seluruh warga, santunan yang diberikan sangat dirasakan membantu kebutuhan warga, akses memudahkan masyarakat dan petugas selalu menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan.

Disarankan Kantor Kecamatan Awayan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program santunan kematian agar proses pelayanan dan pencairan bantuan dapat berjalan lebih cepat. Kepala desa dan aparat desa perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syarat, prosedur, dan mekanisme pengajuan. Aparat Desa diharapkan tetap mempertahankan sikap responsif, ramah, dan sungguh-sungguh.

ABSTRACT

DICKI ANDI HERIYADI, NPM. 2022455: Title “IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 16 OF 2022 CONCERNING DEATH BENEFITS IN BARAMBAN VILLAGE, AWAYAN DISTRICT, BALANGAN REGENCY.” Supervised by Mr. Arif Budiman, S.Sos., M.AP (Supervisor I) and Mr. Riswandi Ahdiat, S.Sos., M.A (Supervisor II).

This study is motivated by the Death Benefit Program, which addresses the financial needs arising upon a person's death. Issues identified include a lack of responsiveness among implementers, funds not reaching the intended recipients, and insufficient dissemination of information to the poor. The study aims to examine the implementation of Balangan Regent Regulation Number 16 of 2022 regarding death benefits in Baramban Village, Awayan District, Balangan Regency, as well as the factors influencing it.

The research employs a descriptive qualitative method. Data sources were selected using purposive sampling (12 participants), and data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Collected data were analyzed using techniques comprising data reduction, data presentation, and data verification or conclusion drawing. Data credibility was tested through extended observation, increased persistence, triangulation, negative case analysis, and member checking.

The research results indicate a suboptimal implementation, as evidenced by the following indicators: First, regarding the communication sub-variable, the clarity indicator was poor, as many residents did not yet understand the program. The consistency indicator was good, with death benefits provided equitably. The target indicator was poor, as the program had not yet reached the intended recipients. Second, regarding the resource sub-variable, the implementer competence indicator was poor, as officers/implementers did not fully understand the procedures. The financial resource indicator was good, with the benefits provided being well-aligned with the program's core objectives. The human resource indicator was poor, as the number of officers was insufficient. Third, regarding the disposition sub-variable of the commitment indicator, performance is good, as officers consistently demonstrate earnestness in assisting the public. The attitude indicator is also positive, with officers maintaining a friendly demeanor. However, the process indicator is suboptimal due to frequent delays, and the efficiency indicator is likewise lacking, as the disbursement process often takes longer than expected. Fourth, regarding the bureaucratic structure sub-variable, the SOP indicator is strong, with implementation following very clear procedures. Conversely, the coordination indicator is weak, as information from neighborhood (RT/RW) and village officials is not effectively conveyed. The supervision indicator is also inadequate, as there is no visible, consistently functioning control mechanism. Inhibiting factors include insufficient program outreach, a lack of coordination among parties involved in implementation, and a shortage of human resources. Supporting factors include the equitable distribution of death benefits to all residents, the significant assistance the benefits provide for residents' needs, accessible service for the public, and the officers' demonstrated earnestness in providing service.

It is recommended that the Awayan District Office improve coordination and supervision regarding the death benefit program to accelerate service delivery and disbursement. Village heads and officials need to enhance public outreach regarding requirements, procedures, and application mechanisms. Village officials are encouraged to maintain their responsive, friendly, and earnest attitude.